

## STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BI DALAM MENJAGA INFLASI DAN STABILITAS RUPIAH

### Bank Indonesia's Monetary Policy Strategies in Maintaining Inflation and Rupiah Exchange Rate Stability

Dilli Salsa Fira<sup>1</sup>, Khairiah<sup>2</sup>, Dwi Susanti<sup>3</sup>

<sup>1234</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: Dilli Salsa Fira

Email: [dllisalsafr@gmail.com](mailto:dllisalsafr@gmail.com)<sup>1</sup>, [khairiah66@gmail.com](mailto:khairiah66@gmail.com)<sup>2</sup>, [dwi811315@gmail.com](mailto:dwi811315@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Informasi Artikel:

Diterima 07,06, 2026

Disetujui 17, 06, 2026

Diterbitkan 20, 06, 2026

#### Keywords:

Monetary policy, Bank Indonesia, Inflation, Exchange rate, Economic stability

#### Kata kunci:

Kebijakan moneter, Bank Indonesia, Inflasi, Nilai tukar rupiah, Stabilitas ekonomi

**Abstract.** Inflation and exchange rate stability are crucial indicators in maintaining Indonesia's economic stability. As the central bank, Bank Indonesia plays a strategic role in controlling inflation and preserving the stability of the rupiah through various monetary policy instruments. This study aims to analyze Bank Indonesia's monetary policy strategies in maintaining inflation and exchange rate stability, as well as to evaluate their effectiveness in supporting national economic growth. The research employed a qualitative descriptive approach using secondary data obtained from Bank Indonesia reports, Statistics Indonesia (BPS), scientific journals, and other relevant literature. The findings indicate that Bank Indonesia has successfully managed inflation through the implementation of the Inflation Targeting Framework (ITF), adjustments to the BI-Rate, monetary operations, foreign exchange market interventions, and policy coordination with the government through inflation control teams. These measures contributed to reducing inflation from 5.51% in 2022 to 1.57% in 2024 while maintaining rupiah stability amid global economic pressures. Nevertheless, challenges arising from global economic uncertainty, foreign capital flow volatility, and supply-side inflationary pressures remain significant concerns that require continuous policy vigilance and adaptation.

**Abstrak.** Inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah melalui berbagai kebijakan moneter. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah serta mengevaluasi efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia mampu mengendalikan inflasi melalui penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), penyesuaian BI-Rate, operasi moneter, intervensi pasar valuta asing, serta koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan inflasi dari 5,51% pada 2022 menjadi 1,57% pada 2024 dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Namun, ketidakpastian ekonomi global, volatilitas arus modal asing, dan tekanan inflasi dari sisi pasokan tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

## **PENDAHULUAN**

Inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah merupakan dua indikator makroekonomi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlebihan dapat memengaruhi aktivitas perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas sistem keuangan nasional (Ha et al., 2022). Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar menjadi salah satu fokus utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Bank Indonesia memiliki mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga kebijakan (BI-Rate), operasi moneter, pengaturan likuiditas perbankan, serta intervensi di pasar valuta asing. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menerapkan kerangka Inflation Targeting Framework (ITF), yaitu strategi kebijakan moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dengan suku bunga sebagai instrumen utama pengendalian (Bank Indonesia, 2024). Kerangka ITF terbukti mampu memperkuat kredibilitas bank sentral dan mengarahkan ekspektasi inflasi jangka panjang karena menetapkan komitmen kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bank sentral di negara berkembang yang mempertahankan komitmen ITF secara konsisten, bahkan di tengah tekanan eksternal yang berat, cenderung menghadapi biaya disinflasi yang lebih rendah karena ekspektasi pasar telah terjangkau pada target yang ditetapkan (Mishkin & Kiley, 2025). Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global menghadapi berbagai tantangan yang memberikan tekanan terhadap tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setelah permintaan global runtuh pada awal pandemi COVID-19, tekanan inflasi melonjak tajam pada periode 2021–2022 seiring dengan pemulihan permintaan yang terjadi bersamaan dengan gangguan rantai pasok internasional dan lonjakan harga energi akibat konflik Rusia–Ukraina. Kondisi tersebut merupakan kombinasi guncangan dari sisi permintaan dan penawaran yang terjadi secara simultan serta relatif tidak lazim dalam sejarah ekonomi modern (Ha et al., 2022). Situasi ini diperparah oleh pengetatan moneter agresif yang dilakukan oleh Federal Reserve Amerika Serikat yang memicu arus keluar modal dari negara-negara berkembang dan menekan stabilitas nilai tukar. Lastauskas dan Nguyen (2024) menunjukkan bahwa pengetatan moneter Amerika Serikat yang disertai ketidakpastian kebijakan yang tinggi menyebabkan kontraksi output di negara berkembang yang berlangsung lebih dalam dan lebih lama. Sementara itu, Matschke et al. (2023) dalam kajiannya mengenai pola arus modal di sekitar siklus pengetatan Federal Reserve menemukan bahwa negara berkembang yang merespons lebih awal terhadap pengetatan tersebut cenderung mengalami volatilitas nilai tukar yang lebih terkendali. Temuan-temuan ini sejalan dengan penelitian Mukhlis et al. (2020) yang menegaskan bahwa perubahan suku bunga Federal Reserve berpengaruh signifikan terhadap stabilitas nilai tukar dan kondisi

perekonomian Indonesia, sehingga menuntut Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter yang adaptif dan responsif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Amrini et al. (2014) menemukan bahwa kebijakan moneter berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui jalur suku bunga dan jumlah uang beredar. Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa efektivitas transmisi kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh respons sektor perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian Ningtiyas et al. (2024), Septiani et al. (2024), dan Pane et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dari perspektif internasional, Carriere-Swallow et al. (2016) membuktikan melalui studi lintas negara bahwa kredibilitas kebijakan moneter yang lebih tinggi, yang diukur dari tingkat penjangkaran ekspektasi inflasi, secara signifikan mengurangi pass-through nilai tukar terhadap harga konsumen sehingga memperkuat efektivitas pengendalian inflasi secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, Ibrahim dan Sukmana (2023) secara empiris membuktikan bahwa dalam konteks Indonesia, pengetatan BI-Rate secara konsisten diikuti oleh apresiasi nilai tukar rupiah, yang mengonfirmasi adanya keterkaitan erat antara kebijakan suku bunga dan stabilitas nilai tukar.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut sebagian besar masih memandang aspek inflasi dan stabilitas nilai tukar secara terpisah. Pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi sering dikaji tanpa menelaah secara memadai implikasinya terhadap pergerakan nilai tukar, atau sebaliknya. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode 2022–2024, sebuah fase yang sarat dinamika karena mencakup lonjakan inflasi pascapandemi, tekanan geopolitik akibat konflik Rusia–Ukraina, pengetatan moneter agresif oleh Federal Reserve, hingga transisi menuju fase pelonggaran yang lebih terukur. Padahal, inflasi dan stabilitas nilai tukar merupakan dua indikator yang dalam praktiknya saling berinteraksi. Tekanan terhadap nilai tukar dapat memperburuk inflasi impor, sementara kredibilitas pengendalian inflasi pada gilirannya turut memengaruhi kepercayaan pasar terhadap stabilitas rupiah. Pemisahan kedua aspek tersebut dalam kajian akademis berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang utuh mengenai efektivitas kebijakan moneter secara keseluruhan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan kajian tersebut. Dengan menganalisis secara terpadu berbagai instrumen kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia selama periode 2022–2024, meliputi penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), penyesuaian BI-Rate, operasi moneter, intervensi di pasar valuta asing, serta koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID), penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan secara terintegrasi, tidak hanya dalam mengendalikan inflasi tetapi juga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai implementasi kebijakan moneter serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Bank Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, buku, peraturan Bank Indonesia, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan moneter, inflasi, dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi strategi kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia**

Kondisi inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan dua indikator makroekonomi yang saling berkaitan erat dan menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan moneter suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kedua indikator ini mengalami dinamika yang cukup dramatis sepanjang periode 2020 hingga 2024, yang dipengaruhi oleh berbagai guncangan eksternal maupun tekanan domestik. Mishkin (2007) menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pencapaian kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan moneter yang konsisten serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di mata publik.

Pada tahun 2020 dan 2021, inflasi Indonesia tercatat sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 1,68% dan 1,87% secara year-on-year (yoy). Kondisi ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam permintaan domestik akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat secara signifikan. Meskipun tingkat inflasi yang rendah sering dipandang sebagai kondisi yang positif, inflasi yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat mengindikasikan melemahnya permintaan agregat yang perlu diwaspadai (Septiani et al., 2024).

Memasuki tahun 2022, kondisi tersebut berubah secara drastis. Inflasi Indonesia meningkat menjadi 5,51% (yoy) pada akhir tahun, melampaui batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar  $3,0 \pm 1\%$ . Peningkatan ini dipicu oleh kombinasi berbagai faktor global, antara lain

gangguan rantai pasok internasional pascapandemi, kenaikan harga energi dunia akibat konflik Rusia–Ukraina, serta normalisasi permintaan yang terjadi secara bersamaan di berbagai negara (Badan Pusat Statistik, 2024). Ha et al. (2022) dalam kajian lintas negara yang komprehensif menunjukkan bahwa lonjakan inflasi pada tahun 2022 merupakan fenomena global yang tidak lazim karena hampir seluruh negara menghadapi tekanan dari sisi permintaan dan penawaran secara simultan. Kombinasi kondisi tersebut relatif jarang terjadi dalam sejarah ekonomi modern dan menyebabkan instrumen kebijakan moneter konvensional menghadapi tantangan efektivitas yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Meskipun demikian, inflasi Indonesia yang mencapai 5,51% masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat (8,00%), Inggris (9,06%), dan kawasan Euro (9,25%) pada periode yang sama. Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan penerapan Inflation Targeting Framework (ITF) oleh Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku ekonomi.

Tren inflasi kemudian menunjukkan perbaikan yang konsisten sepanjang tahun 2023. Inflasi secara bertahap menurun dari 5,47% pada Februari 2023 menjadi 2,61% (yoy) pada akhir tahun, sehingga kembali berada dalam rentang sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar  $3,0 \pm 1\%$ . Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat inflasi terendah di antara anggota G20, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat (3,40%), India (5,69%), Inggris (4,00%), dan Rusia (7,40%) pada tahun yang sama (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, ketika inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 1,57% (yoy), yang merupakan tingkat inflasi terendah dalam lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2025).

**Tabel 1. Perkembangan Inflasi IHK Indonesia Tahun 2020–2024**

Tahun	Inflasi IHK (% yoy)	Sasaran BI (%)	Status	Catatan Utama
2020	1,68	$3,0 \pm 1\%$	Di bawah sasaran	Dampak pandemi COVID-19
2021	1,87	$3,0 \pm 1\%$	Di bawah sasaran	Pemulihan ekonomi bertahap
2022	5,51	$3,0 \pm 1\%$	Melampaui sasaran	Harga energi & pangan global melonjak
2023	2,61	$3,0 \pm 1\%$	Dalam sasaran	Terendah dalam dua dekade terakhir
2024	1,57	1,5 – 3,5%	Dalam sasaran	Terendah dalam 5 tahun terakhir

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024); Bank Indonesia (2024), diolah*

Pola inflasi pada Tabel 1 menunjukkan dua temuan penting yang perlu diinterpretasikan secara lebih mendalam. Pertama, puncak inflasi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 5,51%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota G20, bukan semata-mata disebabkan oleh tekanan eksternal yang lebih ringan di Indonesia. Kondisi tersebut juga mencerminkan kemampuan Inflation Targeting Framework (ITF) Bank Indonesia dalam menjangkarkan ekspektasi inflasi masyarakat sehingga lonjakan harga yang berasal dari sisi penawaran tidak serta-merta berkembang menjadi inflasi yang lebih persisten. Carriere-Swallow et al. (2016), melalui studi lintas negara yang membandingkan pengalaman berbagai bank sentral, menunjukkan bahwa negara dengan kredibilitas kebijakan moneter yang tinggi, yang tercermin dari kuatnya penjangkaran ekspektasi inflasi, cenderung mengalami pass-through nilai tukar ke harga konsumen yang lebih rendah. Implikasi temuan tersebut bagi Indonesia adalah bahwa depresiasi rupiah yang terjadi sepanjang periode 2022–2023 tidak secara proporsional mendorong lonjakan inflasi impor karena kredibilitas ITF yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Kedua, penurunan inflasi dari 5,51% pada tahun 2022 menjadi 2,61% pada tahun 2023 mencerminkan efektivitas respons kebijakan yang tepat waktu, sebuah pencapaian yang didukung oleh sinergi antara kenaikan BI-Rate yang agresif untuk mengendalikan permintaan dan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada penguatan sisi pasokan pangan.

Dari sisi nilai tukar, rupiah menghadapi tekanan depresiasi yang cukup kuat sepanjang periode 2022–2024, terutama akibat pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve yang mendorong arus keluar modal dari negara-negara berkembang. Mardiyani et al. (2025) mencatat bahwa volatilitas nilai tukar rupiah selama periode tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan tingkat suku bunga antara Bank Indonesia dan Federal Reserve serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Dalam konteks ini, kenaikan BI-Rate tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi dari sisi permintaan, tetapi juga sebagai alat stabilisasi nilai tukar. Ibrahim dan Sukmana (2023) menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) untuk menunjukkan bahwa pengetatan BI-Rate secara konsisten diikuti oleh apresiasi nilai tukar rupiah, dengan pengaruh yang semakin kuat ketika diukur melalui diferensial suku bunga antara BI-Rate dan Fed Funds Rate. Sementara itu, Lastauskas dan Nguyen (2024) menunjukkan bahwa pengetatan moneter di Amerika Serikat yang disertai tingkat ketidakpastian kebijakan yang tinggi dapat menyebabkan kontraksi output yang lebih dalam dan lebih lama di negara-negara berkembang dibandingkan kondisi pengetatan normal. Temuan ini memperjelas besarnya tekanan eksternal yang dihadapi Indonesia sekaligus menggarisbawahi pentingnya respons kebijakan yang tepat waktu dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

### **Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia**

Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan moneter yang bersifat antisipatif dan komprehensif dalam menghadapi tekanan inflasi dan gejolak nilai tukar rupiah selama periode 2022–2024. Strategi tersebut dijalankan dalam kerangka Inflation Targeting Framework (ITF),

yaitu pendekatan kebijakan moneter yang menempatkan inflasi sebagai sasaran utama dengan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama pengendalian. Posen et al. (1998) menjelaskan bahwa penerapan ITF secara konsisten terbukti mampu menurunkan ekspektasi inflasi jangka panjang serta meningkatkan kredibilitas bank sentral di mata publik dan pasar keuangan. Mishkin dan Kiley (2025) dalam kajian terkininya mengenai evolusi inflation targeting selama tiga dekade terakhir menambahkan bahwa bank sentral di negara berkembang yang mempertahankan komitmen terhadap ITF secara konsisten, bahkan di tengah tekanan eksternal yang berat, cenderung menghadapi biaya disinflasi (*sacrifice ratio*) yang lebih rendah karena ekspektasi pasar telah terjangkau dengan baik pada target yang ditetapkan.

Respons kebijakan moneter yang paling menonjol selama periode tersebut adalah penyesuaian BI-Rate secara agresif yang dimulai pada Agustus 2022. Dari level 3,50% yang bersifat akomodatif sejak masa pandemi, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara bertahap hingga mencapai 6,00% pada Oktober 2023 atau meningkat sebesar 250 basis poin (bps). Bank Indonesia (2023a) menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah *pre-emptive*, *front-loaded*, dan *forward-looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Matschke et al. (2023) dalam kajiannya mengenai pola arus modal di sekitar siklus pengetatan Federal Reserve menemukan bahwa bank sentral negara berkembang yang merespons lebih awal, baik sebelum maupun bersamaan dengan pengetatan The Fed, cenderung mengalami arus keluar modal yang lebih terkendali serta volatilitas nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan negara yang merespons lebih lambat. Respons proaktif Bank Indonesia sejak Agustus 2022 menempatkan Indonesia dalam kelompok tersebut, yang turut menjelaskan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang relatif terkendali meskipun The Fed menaikkan suku bunga sebesar 525 bps pada periode yang sama.

Seiring dengan terkendalinya inflasi, Bank Indonesia memasuki fase pelonggaran kebijakan secara terukur. Penurunan BI-Rate dimulai pada September 2024 dan berlanjut secara bertahap hingga mencapai 4,75% pada Desember 2025, sejalan dengan prakiraan inflasi tahun 2026 yang diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran  $2,5 \pm 1\%$  (Bank Indonesia, 2025). Langkah ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis data sebagaimana direkomendasikan oleh Mishkin (2007b), bahwa suku bunga kebijakan perlu merespons secara fleksibel terhadap perubahan kondisi makroekonomi tanpa mengurangi komitmen terhadap pencapaian target inflasi.

**Tabel 2. Riwayat Perubahan BI-Rate Tahun 2022–2025**

Periode	BI-Rate (%)	Arah Kebijakan	Latar Belakang
Agustus–November 2022	3,75 → 5,25	Pengetatan agresif	Lonjakan inflasi & tekanan nilai tukar
Januari–September 2023	5,75	Ditahan stabil	Inflasi mulai terkendali, stabilisasi rupiah

---

Oktober 2023	6,00	Pengetatan lanjutan	Rupiah tertekan, ketidakpastian Timur Tengah
Desember 2023– Agustus 2024	6,00	Ditahan stabil	Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
September–Desember 2024	6,00 → 5,25	Pelonggaran awal	Inflasi terkendali, dorong pertumbuhan
Desember 2025	4,75	Pelonggaran berlanjut	Inflasi dalam sasaran, mendukung ekonomi nasional

---

*Sumber: Bank Indonesia (bi.go.id, 2025), diolah*

Pola perubahan BI-Rate pada Tabel 2 mencerminkan tiga fase kebijakan yang masing-masing memiliki landasan dan tujuan yang berbeda. Pada fase pengetatan (Agustus 2022–Oktober 2023), kenaikan kumulatif sebesar 250 basis poin (bps) dalam kurun waktu 14 bulan menunjukkan prioritas utama Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekspektasi pasar, meskipun dengan konsekuensi perlambatan pertumbuhan kredit dalam jangka pendek. Pada fase stabilisasi (Desember 2023–Agustus 2024), keputusan untuk mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% selama hampir satu tahun bukan sekadar mencerminkan inersia kebijakan, melainkan strategi untuk mengantisipasi risiko arus keluar modal (capital outflow) yang dapat timbul akibat pelonggaran kebijakan yang terlalu dini. Lastauskas dan Nguyen (2024) menunjukkan bahwa divergensi kebijakan moneter antara bank sentral negara berkembang dan Federal Reserve berkorelasi dengan meningkatnya volatilitas arus modal internasional. Selanjutnya, pada fase pelonggaran (September 2024 dan seterusnya), penurunan BI-Rate secara bertahap mencerminkan keyakinan bahwa ekspektasi inflasi telah terjangkau dengan baik sehingga ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dibuka tanpa menimbulkan risiko peningkatan inflasi yang berlebihan. Ketiga fase tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang relatif tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama justru berkontribusi dalam membangun fondasi stabilitas makroekonomi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah, sebagaimana dikemukakan oleh Pane et al. (2024).

Selain melalui penyesuaian suku bunga kebijakan, Bank Indonesia juga mengandalkan instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas dalam sistem perbankan. Melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Bank Indonesia secara aktif menyerap kelebihan likuiditas sekaligus menarik arus masuk modal asing yang dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Kebijakan sterilisasi tersebut dinilai efektif karena mampu menetralkan dampak ekspansif dari akumulasi cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar, sehingga tekanan inflasi yang bersumber dari faktor moneter dapat tetap terkendali (Mukhlis et al., 2020).

Instrumen penting lainnya adalah intervensi aktif di pasar valuta asing melalui pendekatan dual intervention, yaitu pembelian rupiah di pasar spot untuk menahan laju depresiasi nilai tukar serta intervensi di pasar domestic non-deliverable forward (DNDF) untuk membentuk ekspektasi

nilai tukar yang lebih stabil. Jumiati (2022) menegaskan bahwa intervensi nilai tukar yang dilakukan secara terencana dan didukung oleh cadangan devisa yang memadai merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang rentan terhadap gejolak arus modal asing.

Dimensi penting lainnya adalah penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi ini difokuskan pada pengendalian inflasi dari sisi pasokan, khususnya untuk komoditas pangan strategis yang memiliki tingkat volatilitas harga yang tinggi. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terbukti berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan, terutama pada periode-periode dengan peningkatan permintaan yang tinggi, seperti Ramadan dan Hari Raya Idulfitri (Bank Indonesia, 2023b). Sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut sejalan dengan pandangan Ningtias et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan koordinasi lintas kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.

### **Dampak Kebijakan terhadap Inflasi dan Nilai Tukar**

Rangkaian kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia selama periode 2022–2024 menghasilkan dampak yang dapat dievaluasi dari berbagai dimensi. Secara keseluruhan, capaian yang diperoleh mencerminkan kemampuan Bank Indonesia dalam menyeimbangkan dua tujuan yang sering kali menghadapi trade-off, yaitu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Latifah et al., 2025).

Dampak yang paling nyata terlihat pada keberhasilan mengembalikan inflasi ke dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Setelah mencapai 5,51% pada tahun 2022, tingkat inflasi berhasil diturunkan menjadi 2,61% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 1,57% pada tahun 2024. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas dua jalur transmisi kebijakan moneter yang bekerja secara simultan. Pertama, melalui jalur suku bunga. Amrini et al. (2014) dalam kajiannya mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia menemukan bahwa penyesuaian BI-Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui perubahan suku bunga perbankan, volume kredit, dan pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat. Kedua, melalui jalur nilai tukar. Ibrahim dan Sukmana (2023) membuktikan bahwa pengetatan BI-Rate secara konsisten diikuti oleh apresiasi nilai tukar rupiah yang pada akhirnya membantu menekan inflasi impor yang bersumber dari kenaikan harga energi dan pangan internasional. Keterpaduan kedua jalur tersebut diperkuat oleh temuan Carriere-Swallow et al. (2016) yang menunjukkan bahwa negara dengan kredibilitas kebijakan moneter yang tinggi cenderung mengalami pass-through nilai tukar ke harga konsumen yang lebih rendah. Temuan ini menjelaskan mengapa depresiasi rupiah sekitar 8% selama periode tersebut tidak diikuti oleh lonjakan inflasi impor yang sebanding di Indonesia.

Dari sisi stabilitas nilai tukar, efektivitas kebijakan Bank Indonesia juga terlihat cukup jelas. Meskipun nilai tukar rupiah tetap menghadapi tekanan selama periode tersebut, Bank

Indonesia berhasil mencegah terjadinya depresiasi yang berlebihan melalui kombinasi intervensi di pasar valuta asing dan pengelolaan cadangan devisa yang prudent. Cadangan devisa Indonesia meningkat dari USD 137,2 miliar pada akhir tahun 2022 menjadi USD 149,9 miliar pada September 2024. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada kisaran tiga bulan impor (Bank Indonesia, 2024).

**Tabel 3. Posisi Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah 2022–2024**

Tahun	Cadangan Devisa (USD Miliar)	Kurs (Rp/USD)	Rata-rata	Keterangan
2022	137,2	~14.900		Tekanan kurs; BI intensifkan intervensi valas
2023	137,1 (Agustus)	~15.200		Stabil; dukungan ekspor dan pengelolaan devisa
2024 (Sept.)	149,9	~16.162		Tertinggi; setara 6,6 bulan kebutuhan impor

*Sumber: Bank Indonesia (2024); Statista (2024), diolah*

Tabel 3 menunjukkan pola yang menarik untuk dianalisis. Meskipun nilai tukar rupiah rata-rata terus mengalami depresiasi dari sekitar Rp14.900 per USD pada tahun 2022 menjadi Rp16.162 per USD pada tahun 2024, cadangan devisa Indonesia justru meningkat secara signifikan. Dalam kondisi tekanan nilai tukar yang berlangsung berkepanjangan, cadangan devisa umumnya cenderung menurun akibat tingginya intensitas intervensi bank sentral di pasar valuta asing. Namun, pola yang terjadi di Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia berhasil menarik arus masuk modal yang cukup besar melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang menawarkan imbal hasil kompetitif, sehingga tidak hanya bergantung pada penggunaan cadangan devisa untuk menahan pelemahan nilai tukar.

Dinamika tersebut sejalan dengan temuan Ibrahim dan Sukmana (2023) yang menunjukkan bahwa diferensial suku bunga antara BI-Rate dan Fed Funds Rate merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan arus modal ke Indonesia. Selama BI-Rate dipertahankan pada level 6,00% sementara sinyal pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve mulai muncul pada akhir tahun 2023, selisih imbal hasil yang menguntungkan mendorong masuknya investasi asing ke instrumen keuangan berbasis rupiah. Dengan demikian, strategi mempertahankan suku bunga pada tingkat yang relatif tinggi tidak hanya efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi nilai tukar yang terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan kurs, melainkan juga dari kemampuannya menjaga stabilitas eksternal secara keseluruhan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia berhasil mempertahankan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 5% sepanjang periode pengetatan moneter, sebuah capaian

yang cukup kuat mengingat banyak negara lain mengalami perlambatan ekonomi yang lebih signifikan akibat tingginya suku bunga global. Pane et al. (2024) mencatat bahwa ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh kuatnya konsumsi domestik serta kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan, termasuk pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan.

**Tabel 4. Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia terhadap Perekonomian**

Aspek	Dampak Positif	Dampak yang Perlu Dicermati
Pengendalian Inflasi	Turun dari 5,51% (2022) menjadi 1,57% (2024); masuk rentang sasaran BI	Risiko deflasi jika pengetatan berlangsung terlalu panjang
Stabilitas Tukar	Nilai Volatilitas terjaga; intervensi valas cegah depresiasi ekstrem	Masih rentan terhadap sudden capital outflow dari investor asing
Kepercayaan Investor	Cadangan devisa meningkat ke USD 149,9 miliar; sentimen pasar membaik	Ketergantungan pada portofolio asing perlu dikurangi secara bertahap
Pertumbuhan Ekonomi	PDB tumbuh di atas 5% meski dalam siklus pengetatan moneter	Transmisi kebijakan ke kredit sektor riil masih relatif lemah

*Sumber: Bank Indonesia (2024); BPS (2024); LPS (2024), analisis penulis*

Tabel 4 perlu dipahami sebagai refleksi dari pilihan kebijakan yang dilakukan secara cermat, bukan sekadar kumpulan capaian yang berhasil diraih. Pada aspek pengendalian inflasi, risiko deflasi yang tercantum dalam kolom dampak yang perlu dicermati bukan hanya merupakan catatan teoritis. Bank Indonesia telah mengantisipasi risiko tersebut melalui siklus pelonggaran kebijakan yang dimulai pada September 2024, jauh sebelum inflasi mendekati zona deflasi. Pendekatan ini mencerminkan karakter kebijakan yang bersifat forward-looking. Mishkin dan Kiley (2025) menegaskan bahwa bank sentral yang efektif tidak menunggu munculnya sinyal negatif dalam data historis, tetapi mampu mengantisipasi risiko melalui proyeksi yang akurat dan respons kebijakan yang tepat waktu. Pada aspek stabilitas nilai tukar, kerentanan terhadap sudden capital outflow yang tercantum dalam tabel mencerminkan keterbatasan struktural yang masih dihadapi Indonesia. Lastauskas dan Nguyen (2024) mengemukakan bahwa selama ketergantungan terhadap investasi portofolio asing dalam pembiayaan eksternal masih tinggi, sensitivitas nilai tukar terhadap perubahan kebijakan Federal Reserve akan tetap signifikan. Sementara itu, pada aspek transmisi kredit yang masih relatif lemah, temuan Firmansyah (2022) mengenai hambatan struktural dalam sektor perbankan tetap relevan. Dalam konteks tersebut, kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang dilakukan Bank Indonesia merupakan langkah yang tepat, meskipun dampaknya terhadap peningkatan penyaluran kredit, khususnya kepada UMKM, memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat dirasakan secara optimal.

Meskipun demikian, terdapat trade-off yang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan dalam jangka waktu relatif panjang berpotensi menekan

pertumbuhan kredit dan investasi sektor riil, yang pada akhirnya dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Firmansyah (2022) mencatat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain tingginya tingkat kehati-hatian perbankan dan terbatasnya akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, Carriere-Swallow et al. (2016) menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi melalui saluran nilai tukar perlu didukung oleh kebijakan fiskal dan reformasi struktural agar manfaat stabilitas harga dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh pelaku pasar keuangan. Oleh karena itu, langkah pelonggaran kebijakan yang mulai ditempuh sejak September 2024 dapat dipandang sebagai keputusan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

### **Tantangan Kebijakan Moneter Saat Ini**

Keberhasilan Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan moneter selama periode 2022–2024 tidak berarti bahwa tantangan ke depan telah sepenuhnya teratasi. Dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan sulit diprediksi menuntut Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas analisis, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan menjaga efektivitas komunikasi kepada publik serta pelaku pasar.

Tantangan pertama adalah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang. Perubahan arah kebijakan Federal Reserve memiliki pengaruh langsung terhadap pergerakan arus modal internasional dan volatilitas nilai tukar rupiah. Mukhlis et al. (2020) menemukan bahwa sensitivitas perekonomian Indonesia terhadap perubahan kebijakan The Fed masih relatif tinggi sehingga diperlukan penguatan fundamental ekonomi domestik sebagai bantalan kebijakan. Lastauskas dan Nguyen (2024) menunjukkan bahwa pengetatan moneter di Amerika Serikat yang disertai tingkat ketidakpastian kebijakan yang tinggi dapat menyebabkan kontraksi output yang lebih dalam dan berlangsung lebih lama di negara berkembang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa siklus kebijakan Federal Reserve ke depan, baik dalam arah pengetatan maupun pelonggaran, akan tetap menjadi salah satu faktor eksternal utama yang memengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia.

Tantangan kedua berkaitan dengan kerentanan nilai tukar rupiah terhadap arus modal asing jangka pendek. Ketergantungan terhadap investasi portofolio asing masih relatif besar sehingga pergerakan nilai tukar sangat sensitif terhadap perubahan sentimen pasar global. Amrini et al. (2014) menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah hanya dapat dicapai secara berkelanjutan apabila didukung oleh penguatan struktur ekspor nasional dan peningkatan daya saing ekonomi. Dalam konteks ini, temuan Ibrahim dan Sukmana (2023) menjadi sangat relevan. Ketika Bank Indonesia mulai melonggarkan BI-Rate, diferensial imbal hasil yang selama ini menjadi daya tarik investor asing akan semakin menyempit. Oleh karena itu, pengelolaan ekspektasi pasar dan komunikasi kebijakan yang transparan menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya arus keluar modal secara tiba-tiba.

Tantangan ketiga adalah tekanan inflasi struktural yang berasal dari kelompok volatil food. Komponen pangan bergejolak masih memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi

nasional dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kebijakan moneter, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, dan gangguan distribusi. Latifah et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi pangan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur distribusi yang memadai.

Tantangan keempat adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi—sebuah dilema klasik yang dihadapi oleh setiap bank sentral. Ketika inflasi telah terkendali, ruang pelonggaran kebijakan untuk mendorong kredit dan investasi menjadi lebih terbuka. Namun, pelonggaran yang terlalu agresif dapat memicu kembali tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar yang berpotensi mengurangi kepercayaan pasar. Rahmatullah (2025) menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan, konsisten, dan terukur agar ekspektasi inflasi masyarakat serta pelaku pasar tetap terjangkau pada sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan moneter Bank Indonesia selama periode 2022–2024 berjalan efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global yang cukup berat. Keberhasilan tersebut didukung oleh konsistensi penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), kebijakan suku bunga yang adaptif, penguatan operasi moneter, intervensi pasar valuta asing yang terukur, serta koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas respons kebijakannya terhadap perubahan lingkungan global dengan tetap menjaga komitmen terhadap mandat utamanya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024; Ningtiyas et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan moneter Bank Indonesia selama periode 2022–2024 berjalan efektif dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), penyesuaian BI-Rate, operasi moneter, intervensi pasar valuta asing, serta sinergi dengan pemerintah melalui TPIP dan TPID, Bank Indonesia mampu menurunkan inflasi kembali ke dalam rentang sasaran yang ditetapkan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh penguatan cadangan devisa dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan moneter negara maju, volatilitas arus modal asing, serta tekanan inflasi dari sisi pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu terus menerapkan kebijakan yang adaptif, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi agar ketahanan ekonomi nasional dapat terpelihara secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrini, Y., Aimon, H., & Syofyan, E. (2014). Analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi dan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(4), 1–29.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Produk Domestik Bruto Indonesia 2019–2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita resmi statistik: Perkembangan indeks harga konsumen Desember 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter*.
- Bank Indonesia. (2023a). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022*. Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023b). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023*. Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Inflasi*.
- Bank Indonesia. (2024). *Kebijakan moneter*.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Memperkuat Resiliensi dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*. Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Operasi moneter*.
- Bank Indonesia. (2024). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter*.
- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter*.
- Bank Indonesia. (2025). *Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2025*. Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026*.
- Carriere-Swallow, Y., Gruss, B., Magud, N. E., & Valencia, F. (2016). *Monetary policy credibility and exchange rate pass-through*. International Monetary Fund.
- Firmansyah, M. (2022). Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan dan harga aset dalam sasaran akhir inflasi. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(2), 191–203.
- Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. (2022). *From low to high inflation: Implications for emerging market and developing economies*. SSRN Electronic Journal.
- Ibrahim, M. H., & Sukmana, R. (2023). Monetary policy and exchange rate in a large emerging economy. *Global Business Review*, 09721509231198659.
- Jumiati, E. (2022). Kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi dan nilai tukar (Peran bank sentral). *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Lastauskas, P., & Nguyen, A. D. M. (2024). Spillover effects of US monetary policy on emerging markets amidst uncertainty. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 92, 101956.
- Latifah, D., Febriani, L., & Dwilaga, S. A. (2025). Peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 11149–11155.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar ekonomi makro*. Salemba Empat.

- Mardiyani, S., Nabila, J., Kurniawan, A., Elfrian, A., Maulani, Z., Apriyanti, M., & Sinaga, J. F. (2025). Dinamika kebijakan moneter dan diplomasi ekonomi dalam menjaga stabilitas nilai tukar (Studi kasus Indonesia di pasar internasional). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 46–61.
- Matschke, J., von Ende-Becker, A., & Sattiraju, S. A. (2023). Capital flows and monetary policy in emerging markets around Fed tightening cycles. *Economic Review*, 108(4).
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary policy strategy*. MIT Press.
- Mishkin, F. S., & Kiley, M. (2025). *The evolution of inflation targeting from the 1990s to the 2020s: Developments and challenges*. National Bureau of Economic Research.
- Mukhlis, I., Hidayah, I., & Retnasih, N. R. (2020). Interest rate volatility of the federal funds rate: Response of Bank Indonesia and its impact on Indonesian economic stability. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(1), 111–133.
- Ningtiyas, S. D. A., Maghfiroh, S., Hasan, H. M., & Astuti, R. P. (2024). Efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 723–726.
- Nopirin. (2016). *Ekonomi moneter buku II*. BPFE Yogyakarta.
- Pane, S., Fernanda, R., Althaaf, S., Waruru, T., & Silalahi, M. (2024). Analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 751–757.
- Posen, A. S., Laubach, T., & Mishkin, F. S. (1998). *Inflation targeting: Lessons from the international experience*. Princeton University Press.
- Rahmatullah, D. (2025). Efektivitas kebijakan moneter terhadap inflasi. *Jurnal Ekonomika*, 16(3), 496–512.
- Septiani, S., Rahmawati, T., Oktariani, V. D., Evi, E., & Fadilla, A. (2024). Peran kebijakan moneter di Indonesia dalam menghadapi inflasi. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(3), 1–7.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi teori pengantar*. Rajawali Pers.